



95 Persen Penduduk Yogya Terdaftar JKN-KIS

JOGJA, BERNAS -- Sejumlah 95 persen penduduk Kota Yogyakarta telah terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Pemerintah Kota Yogyakarta. Hal ini membuktikan komitmen BPJS Kesehatan Yogyakarta dalam memberikan kepastian perlindungan atas hak jaminan sosial kesehatan bagi warga Yogyakarta.

Meski demikian, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Sri Mugirahayu, mengungkapkan jika pihaknya mempunyai target maksimal, pada 1 Januari 2019 mendatang. "Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kami berharap pada 1 Januari 2019 seluruh penduduk sudah terdaftar dalam program JKN-KIS atau cakupan semesta jaminan kesehatan. Padahal, pemerintah menetapkan bahwa untuk dapat dikatakan cakupan semesta setidaknya 95% penduduk," katanya usai penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Penanjan Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta di Ruang Yudhistra Kompleks Balaikota Yogyakarta, Jumat (27/10).

Berdasarkan data masterfile BPJS Kesehatan, jumlah peserta JKN-KIS Kota Yogyakarta per 30 September 2017 sebanyak 381.611 jiwa dari total jumlah penduduk

410.262 jiwa. Di bulan Oktober ini ada penambahan 8.806 jiwa sehingga per 01 November nanti jumlah peserta JKN-KIS Kota Yogyakarta sebanyak 390.417 atau 95,16 persen dari total jumlah penduduk.

"Dengan jumlah tersebut sudah dapat dikatakan Cakupan Semesta," kata wanita yang akrab disapa Cici ini.

Dia menjelaskan penambahan peserta pada bulan Oktober ini berasal dan berbagai segmen. Di antaranya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPUP) atau mandiri menunggak yang masuk kriteria miskin dan memiliki KTP-el dan/atau KK Kota Yogyakarta, peserta baru dan bayi baru lahir dari peserta yang telah didaftarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pemerintah Kota Yogyakarta yang bukan penduduk Kota Yogyakarta dan belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS sampai dengan pekerja penerima upah non aktif yang masuk kriteria miskin serta memiliki KTP-el dan/atau KK Kota Yogyakarta.

"Kami mengapresiasi semangat Pemerintah Kota Yogyakarta yang berkomitmen untuk mewujudkan cakupan semesta jaminan kesehatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah atas keberlangsungan dan keberhasilan program JKN-KIS," ungkapnya. ●

(jay)



GALH WEYAYAHARAN BERNAS

KERJA SAMA -- Pemerintah Kota Yogyakarta menandatangani kesepakatan bersama dengan BPJS Kesehatan Kota Yogyakarta, di Ruang Yudhistra Kompleks Balaikota Yogyakarta, Jumat (27/10).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005